



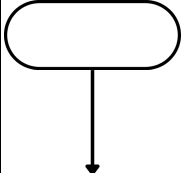
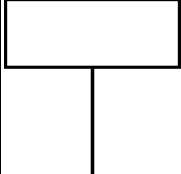
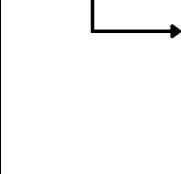
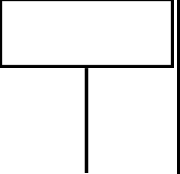
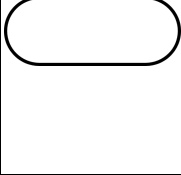
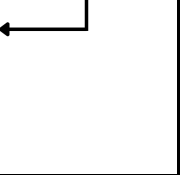
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No. 8 Semaki, Yogyakarta
Telepon (0274) 513492 | Faksimili (0274) 516030
Surel : kanwildiy@kemenag.go.id
Website: diy.kemenag.go.id

Nomor SOP	4202.45/Kw.12.1/06/2024
Tgl Pembuatan	01/06/2024
Tgl Revisi	06/07/2026
Tgl Efektif	06/07/2026
Disahkan Oleh	Kepala Bagian Tata Usaha  H. ABD SU'UD S.Ag, M.S.I NIP. 197105031996031001

SOP PENGELOLAAN WEBSITE

Dasar Hukum: 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. KMA No. 92 Tahun 2019 sebagai payung hukum umum PPID Kementerian Agama.	Kualifikasi Pelaksana: 1. Pranata Humas 2. Kepala Bagian Tata Usaha
Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Berita Media Sosial 2. SOP Keamanan Informasi	Peralatan/Perlengkapan: 1. Kamera 2. Alat tulis 3. Gawai/Laptop 4. Buku KBBi 5. Aplikasi kompresi gambar 6. Dashboard CMS
Peringatan: • Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan tidak maksimal.	Pencatatan dan Pendataan: • Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pranata Humas	Kepala Bagian Tata Usaha	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan data lapangan, dan menyusun draf awal rilis pers maksimal 24 jam setelah acara selesai.			Kamera, Alat Tulis, Gawai/Laptop	1 hari	Draf rilis berita	–
2.	Memeriksa keabsahan data/angka, menyelaraskan narasi dengan prinsip moderasi beragama.			Laptop/PC, Buku Panduan PUEBI	1-2 jam	Draf rilis berita layak tayang	–
3.	Menelaah, memverifikasi, dan memberikan persetujuan final (approval) khusus untuk draf counter berita.			Lembar Disposisi	1 jam	Rekomendasi Tayang Resmi	–
4.	Mengompresi resolusi foto pendukung agar optimal dan mengunggah teks berita.			Dashboard Website, File Foto & Teks	30 menit	Berita resmi terbit publik di website	–

Seluruh tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan standar pelayanan prima dan profesional dalam rangka mewujudkan ZI-WBK dan WBBM, bebas dari korupsi dan gratifikasi.